

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Ingli Intan Hadju¹, Vecky A.J Masinambow², Mauna Th.B Maramis³

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : ingliintan@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan hasil pembangunan menjadi sasaran yang utama. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan ketimpangan pembangunan pada setiap daerah. Kondisi ketimpangan pendapatan yang cukup besar terjadi menimbulkan perbedaan pendapatan yang timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal. Karakteristik suatu wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi. Ketidakteraturan ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antardaerah yang terjadi di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pembangunan wilayah provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara (BPS SULUT). Alat analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dengan angka yang tinggi yaitu 0,5

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pembangunan, Indeks Williamson*

ABSTRACT

In the implementation of development, high economic growth accompanied by equitable distribution of development results is the main target. However, in reality, high economic growth causes development inequality in each region. The condition of income inequality that is quite large occurs causes income differences that arise due to differences in the ownership of resources and production factors, especially ownership of capital goods. The characteristics of a region have a strong influence on the creation of patterns of economic development. This non-uniformity affects the ability to grow which in turn causes some areas to grow rapidly while other areas grow slowly. This growth ability then causes inequality in both development and income between regions in Indonesia, especially in North Sulawesi. This study aims to analyze the inequality of development in the province of North Sulawesi. The data used in this study is secondary data obtained from Central Statistics Agency of North Sulawesi (BPS SULUT). The analytical tool used is the Williamson Index. The results showed that there was inequality that occurred in the North Sulawesi Province with a high number of 0.5.

Keywords: *Economic Growth, Development Inequality, Williamson Index*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil pembangunan menjadi sasaran yang utama. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan ketimpangan pembangunan pada setiap daerah.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah dan seluruh komponen masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk membentuk lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan jika tidak dapat diatasi secara hati-hati akan menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, social, politik, lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. (Adhiani 2008)

Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial, dan di sisi lain pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi selama ini juga menimbulkan makin melebarnya ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah. Potensi konflik antar daerah atau wilayah menjadi besar, wilayah-wilayah yang dulu kurang tersentuh pembangunan mulai menuntut hak-haknya. Selain itu muncul suatu interaksi yang saling memperlemah. Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda, oleh karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal yakni perbedaan pada distribusi pendapatan serta secara horizontal yakni perbedaan antara daerah maju dan terbelakang (Sjafrizal, 2008).

Pengeluaran pemerintah cenderung untuk mempersempit jurang perbedaan tersebut dimana pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan medis akan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat lewat kenaikan pengeluaran pemerintah, lapangan pekerjaan yang meluas dan menyebar yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan kemampuan industrialisasi sehingga daerah yang tadinya tertinggal mampu berkembang dan memperkecil ketimpangan yang ada (Jhingan, 2007).

Kualitas sumber daya manusia juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Apabila kualitas sumber daya manusia di suatu daerah baik, maka diharapkan perekonomiannya juga akan lebih baik. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas pendidikan, kesehatan, atau indikator-indikator lainnya. Tingkat pendidikan yang baik akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas, serta menentukan kemampuan dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ketimpangan pendapatan yang cukup besar terjadi menimbulkan perbedaan pendapatan yang timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal. Karakteristik suatu wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi. Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu

tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antardaerah yang terjadi di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara.

Ketimpangan pendapatan dalam pendistribusiannya menyebabkan terjadi kesenjangan antar golongan pendapatan, dimana besar kecilnya pendapatan yang diterima tentu sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan adanya perbedaan dalam pendistribusian pendapatan, tingkat pendapatan masyarakat akan berbedabeda pula pengeluaran tiap keluarga, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada jumlah pendapatan masing-masing masyarakat sesuai klasifikasi pola mata pencaharian. Hal ini juga akan menjadi pijakan dalam mempertimbangkan bagaimana ketimpangan pada masyarakat atau setiap rumah tangga yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 - 2019 (Dalam Jutaan rupiah).

TAHUN	PDRB
2005	18,097,528.30
2006	20,698,673.50
2007	23,139,565.30
2008	26,852,704.10
2009	31,005,624.00
2010	51,721,334.10
2011	54,910,897.49
2012	58,667,586.67
2013	62,422,498.49
2014	66,360,757.00
2015	70,425,330.20
2016	74,764,660.50
2017	79,484,025.02
2018	84,258,549.17
2019	89,028,050.78

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulut, data diolah

Dari data dapat dilihat bahwa PDRB di Provinsi Sulawesi Utara terus mengalami kenaikan. Tahun 2005 PDRB di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 18,097,528,30 kemudian mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tinjauan Pustaka

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian suatu Negara atau daerah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Menurut prasetyo (2009), istilah pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara

paling sederhana dapat diartikan sebagai penambahan output atau penambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan factor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

“*Economic Development is Growth Plus Change*” yang berarti pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak (Sukirno, 1994). Simon Kuznets dalam Sukirno mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu peningkatan sebagai suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan (Sukirno, 1995). Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu meningkat baik jumlah maupun kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, pengalaman kerja, dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Jhingan (1994), Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nyata perkapita lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi berbagai perubahan yang akan meningkatkan sumber-sumber produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nyata perkapita.

Definisi ini memiliki tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk.

Pengertian Ketimpangan

Menurut kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat. Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).

Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan ekonomi antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi dalam suatu daerah. Ketimpangan muncul karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah sehingga kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, pada setiap daerah terdapat wilayah mu dan wilayah terbelakang. Ketimpangan juga memberikan implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang akan mempengaruhi formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah. (Sjafrizal, 1997).

Teori Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu Negara, kltimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangu

terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. (Sjafrizal, 2008). Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi, ada pula dampak negative yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negative tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil. (Todaro, 2004).

Produk Domestik Regional Bruto

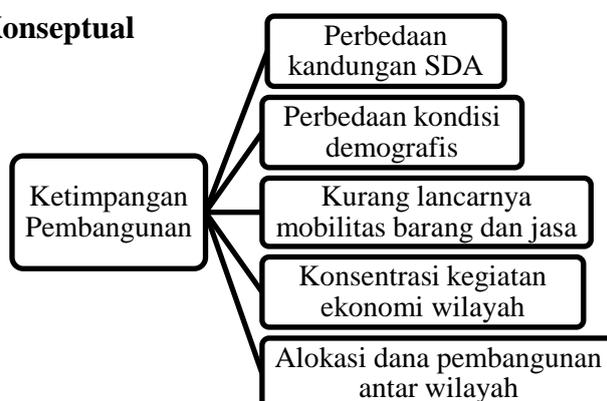
PDRB adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan faktor pendukung dan sekaligus sebagai faktor penghambat di dalam pembangunan. Dikatakan sebagai faktor pendukung karena jumlah penduduk yang besar menyediakan sumber tenaga yang besar pula untuk melaksanakan pembangunan. Faktor penghambat apabila jumlah penduduk yang besar hanya akan menambah beban pemerintah.

Hubungan Antara PDRB Perkapita dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan kenaikan dari PDRB per kapita tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertambahan penduduk (Arsyad, 1997). Menurut Todaro (2004), laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan. Di dalam bukunya Todaro mengemukakan karakter pertumbuhan ekonomi (character of economic growth) yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor-sektor mana saja yang mendapat prioritas, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan yang mengatur, dan sebagainya. Karakter pertumbuhan ekonomi ini yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin atau tidak. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik variabel yang dapat digunakan sebagai variabel independen adalah pendapatan perkapita (PDRB perkapita) yang 36 menunjukkan tingkat pembangunan suatu negara (Sjafrizal, 2008). Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang.

Kerangka Konseptual**Gambar 1. Kerangka Berpikir Ilmiah****2. METODE PENELITIAN****Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di provinsi Sulawesi Utara. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian adalah tahun 2005-2019.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kuantitatif, disamping itu metode metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada obyek yang diteliti.

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta questioner. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2015-2019. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, serta browsing website internet yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Data dan Sumber Data

Data yang Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data PDRB kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan diolah menggunakan aplikasi MS Excel.

Metode Analisis Data

Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan ketidakseimbangan pertumbuhan/pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Untuk mengukur ketimpangan di Sulawesi Utara, digunakan rumus dari indeks wiliamson :

$$IW = \frac{1}{\bar{y}} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \frac{P_i}{P}}$$

Dimana :

y_i = PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota

y = PDRB per kapita Provinsi

p_i = jumlah penduduk wilayah i

p = jumlah penduduk provinsi

Angka indeks ketimpangan indeks wiliamson semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dengan kata lain makin merata, dan bila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Digunakan rumus Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < VW < 1$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Daerah Penelitian

Secara geografis wilayah darat Provinsi Sulawesi Utara terletak antara $0^{\circ}15' - 5^{\circ}34'$ Lintang Utara dan $123^{\circ}07' - 27^{\circ}10'$ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Republik Filipina di sebelah utara dan Laut Maluku di sebelah timur, serta berbatasan dengan Provinsi Gorontalo di sebelah barat dan Teluk Tomini di sebelah selatan. Provinsi ini merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 287 pulau dengan 59 pulau yang berpenduduk dan 228 tidak berpenduduk. Provinsi yang beribukota di Kota Manado ini terdiri dari 15 kabupaten/kota dengan luas wilayah 15.271 Km² dan jumlah populasi sebesar 2.461.028 jiwa (Sumber, 2017).

Kondisi Kependudukan

Provinsi Sulawesi Utara memiliki total jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 2,5 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan angka proyeksi tahun 2015-2016 sebesar 1,03 persen, yang tertinggi terjadi di Kota Kotamobagu sebesar 1,90 persen dan yang terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 0,34 persen. Rasio jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 sebesar 104,19 persen artinya diantara 100 orang wanita terdapat 104 orang lakilaki. Rasio jenis kelamin tertinggi terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 109,43 persen, diikuti Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kab Bolaang Mongondow masing masing sebesar 109,18 persen dan 108,19 persen, sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro sebesar 97,06 persen. Dari total penduduk Sulawesi Utara dibagi dengan luas seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara didapatkan angka kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 sebesar 167,55 per km². Sedangkan untuk kepadatan penduduk Kota Manado sebesar 2.564,31 per km² dan merupakan kota terpadat penduduknya di provinsi Sulawesi Utara. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara bila dilihat menurut kelompok umur, terbesar pada umur 0-4 tahun yaitu sebesar 208.701 orang, jumlah penduduk laki-laki pada kelompok ini sebesar 106.443 orang sedangkan perempuan 102.258 orang.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara (Jiwa)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Bolaang Mongondow	233.189	236.893	240.505	244.185	247.811
Minahasa	329.003	332.190	335.321	338.364	341.176
Kepulauan Sangihe	129.584	130.024	130.493	130.833	131.163
Kepulauan Talaud	88.803	89.836	90.678	91.599	92.475
Minahasa Selatan	204.983	206.603	208.013	209.501	210.695
Minahasa Utara	198.084	199.498	200.985	202.317	203.624
Bolaang Mongondow Utara	76331	77.383	78.437	79.366	80.313
Kepulauan Sitaro	65.582	65.827	65.976	66.225	66.403
Minahasa Tenggara	104.536	105.163	105.714	106.303	106.899
Bolaang Mongondow Selatan	62.222	63.207	64.171	65.127	66.071
Bolaang Mongondow Timur	68.692	69.716	70.610	71.477	72.408
Kota Manado	425.634	427.906	430.133	431.880	433.635
Kota Bitung	205.675	208.995	212.409	215.711	219.004
Kota Tomohon	100.373	101.981	103.711	105.306	106.017
Kota Kotamobagu	119.427	121.699	123.872	126.198	128.387
Sulawesi Utara	2.412.118	2.436.921	2.461.028	2.484.392	2.506.981

Sumber: BPS SULUT

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak tahun 2015 yaitu kota Manado dengan angka 425.634 jiwa dan yang sedikit yaitu kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 62.222 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2016 masih berada pada kota Manado dengan angka 427.906 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 63.207 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2017 yaitu Kota Manado dengan angka 430.133 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 64.171 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak tahun 2018 yaitu Kota Manado dengan angka 431.880 jiwa dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 65.127 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2019 juga tetap dipegang oleh Kota Manado dengan angka 433.635 jiwa

dan yang sedikit yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan angka 66.071 jiwa.

PDRB Perkapita

Berdasarkan data PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan antar Kabupaten/Kota SULUT dapat tercermin bahwa dari tahun ke tahun PDRB Perkapita SULUT terus mengalami peningkatan.

Tabel 3 PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Bolaang Mongondow	17.760.700,55	18.629.504	19.573.227	20.722.432	22.020.689
Minahasa	28.417.582,82	29.850.113	31.365.292	32.984.783	34.616.011
Kepulauan Sangihe	18.672.806,83	19.740.694	20.741.120	22.053.427	22.962.985
Kepulauan Talaud	14.853.574,77	15.458.680	16.096.914	16.957.161	17.391.425
Minahasa Selatan	23.726.362,67	24.737.371	26.173.061	27.570.131	29.084.990
Minahasa Utara	36.696.941,70	39.066.376	41.237.197	43.610.784	45.989.628
Bolaang Mongondow Utara	17.295.764,50	18.111.342	18.990.056	19.928.521	20.908.284
Kepulauan Sitaro	18.651.504,99	19.883.726	21.226.385	22.570.404	24.008.674
Minahasa Tenggara	27.392.764,50	28.948.984	30.630.077	32.289.992	34.044.668
Bolaang Mongondow Selatan	16.704.606,09	17.452.750	18.263.063	19.182.505	20.124.396
Bolaang Mongondow Timur	22.252.955,22	23.148.402	24.160.912	25.079.214	26.002.237
Kota Manado	46.455.856,44	49.529.165	52.594.523	55.864.029	58.993.495
Kota Bitung	44.073.621,00	45.635.278	47.678.549	49.769.525	51.074.871
Kota Tomohon	24.529.883,53	25.154.686	26.922.602	28.138.852	29.604.160
Kota Kotamobagu	15.540.572,90	16.262.303	17.061.233	17.863.619	18.644.520
Sulawesi Utara	24.868.366,55	26.103.292	27.514.281	28.972.359	30.364.736

Sumber: BPS SULUT (data diolah)

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kabupaten/ kota dengan pendapatan perkapita tergolong sangat rendah secara berturut-turut yaitu Kepulauan Talaud, Kotamobagu, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Sangihe. Sementara kabupaten/kota dengan pendapatan perkapita tergolong sangat tinggi secara berturut-turut yaitu Kota Manado, Bitung, Minahasa Utara, Minahasa, Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur.

Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sulawesi Utara

Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

Tabel 4 Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019

Tahun	Indeks Williamson
2015	0,49
2016	0,50
2017	0,50
2018	0,50
2019	0,50

Tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara yang dihitung menggunakan indeks williamson sebesar 0,50. Hal ini berarti bahwa di Sulawesi Utara terjadi ketimpangan pada tingkat level tinggi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis ketimpangan pembangunan wilayah provinsi Sulawesi Utara, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara periode 2015-2019 mengalami peningkatan. Disparitas ini karena perbedaan pendapatan yang dilatarbelakangi oleh beragamnya potensi dan kekayaan alam kabupaten/kota.
2. Pendapatan perkapita kota Manado berada diatas rata-rata dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sementara untuk kabupaten/kota lainnya terus mengalami perubahan sehingga belum stabil dalam pendapatan perkapitanya. Hal ini disebabkan karena pengelolaan sumber daya alam di daerah lain berbeda dengan daerah yang dekat dengan pusat perekonomian sehingga menyebabkan pendapatan perkapitanya dibawa rata-rata.

Saran

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan melakukan pembangunan secara merata untuk setiap kabupaten/kota agar tercipta kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Utara

2. Agar ketimpangan pembangunan yang terjadi dapat teratasi, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui peningkatan PDRB Perkapita

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiani Kartika, Erfit, Bhakti Adi. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan". E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pemabngunan Daerah Vol. 7 No. 1
Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara
- Gracetyani, Juliana, Lyndon. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
- Henny, Debby, Patrick. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No 1.
- Jhingan, M.L (2007). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.
- Kuncoro, Murdijat. (2006). Ekonomi Pembangunan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nurhuda Rama, Muluk Khairul M.R, Prasetyo Yudo Wima. (2011). Analisis Ketimpangan Pembangunan.
- Prasetyo. (2009). Fundamental Makro Ekonomi. Yogyakarta: Beta Offset.
- Sjafrizal. (1997). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. Yogyakarta: LP3ES
- Sjafrizal. (2012). Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers
- Sjafrizal. (2012). Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sadono, Sukirno. (2010). Makroekonomi. Teori Pengantar. Edisi Ketiga. PT. Raja Grasindo Persada. Jakarta.
- Sukirno, (2006). Makro ekonomi: Teori Pengantar, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Todaro, Michael. (2004). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga". Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan, 2004.
- Wijayanto Tri Anton. (2016). Analisis keterkaitan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2000-2010.